

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

OLEH

YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
NIM : 14622317



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2019**

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
NIM : 14622317

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2019**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
NIM : 14622317

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Bambang Sambodo, SE, M.Ak
NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

Hendy Satria, SE, M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
NIM : 14622317

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat Belas
Agustus Dua Ribu Sembilan Belas dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Bambang Sambodo, SE, M.Ak
NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Anggota,

Masyitah As Sahara, SE., M.Si
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA.
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosihara Halimah Thusa'diyah
NIM : 14622317
Tahun Angkatan : 2014
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.28
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL
DAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 14 Agustus 2019

Penyusun

YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
NIM: 14622317

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan rasa syukur yosi persembahkan karya sederhana ini kepada umi tercinta & tersayang Chalidi AL Elisa yang telah banyak mendoakan yosi tanpa henti. Terimakasih atas kasih sayangnya, pengorbanannya, nasehatnya, semangatnya, serta apa saja yang telah diberikan kepada yosi sehingga yosi dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.

Mohon maaf karena tidak bisa membahagiakan umi dengan cara lulus tepat waktu:’)”

“Tak lupa juga yosi persembahkan karya sederhana ini untuk almarhum bapak Soemardi Soedarso, cinta pertama anak perempuannya di dunia.

Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali, aamiin”

Dan

Yang terakhir untuk abangku Teteg Penggalih, Muhammad Buzaar Ar Rifa’I dan adik bungsuku, Nariko Siti Afikah Khusnul Khatimah Ar-rum

Terimakasih atas semangat dan doanya.

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.

“Q.S Al Baqarah : 286”

“Man Jadda Wajada”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil
(Pepatah Arab)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) lain, Dan hanya kepada

Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”

-Q.S Al Insyirah : 6-8-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**. Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE, M.Si., Ak. CA selaku Ketua Wakil Ketua I dan III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Bambang Sambodo, SE., M. Ak. selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dengan banyak kesabaran dalam memberikan pengarahan dan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak. selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu serta pengarahan dan ketelitian dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara serta seluruh staff pada OPD Provinsi Kepulauan Riau yang telah membantu selama penelitian ini dibuat.
8. Saudara tersayang dan terbaik; Ayahteh, Bude Rawit, Mbak Epi, Tante Arfidah, Maklong, Paklong, Om Maryono, Kak Opi dan Yaning atas doa, semangat, dan bantuannya selama ini kepada penulis.
9. Teman terbaper dari SD, SMP, SMA, dan perkuliahan; Putri Hartinah. Makasih ya put udah sabar mengajarkan materi perkuliahan dari yang kurang paham sampai akhirnya yosi paham, makasih udah mengarahkan yosi juga sampai di titik ini, makasih untuk semuanya.
10. Sahabat-sahabatdan teman seperjuangan; Gita Fitrinisa, Tisya Luqyana, Maya Audina, Nitha Bonita, Veny Dwi, Atiqah Febry, Areska Erita, Ridhani, Tri Wulan Dari, Kak Yuki Fitriah, Ria Aprilia dan Wan Vici. Terimakasih sudah selalu ada disaat butuh, sudah banyak membantu, memberi dukungan, meluangkan waktu untuk menghibur disaat stress mengerjakan skripsi ini, serta memberikan warna dan makna di bangku perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat SMA; Anin, Vicky, Windy, Aceng, Wanjul, Mumut, Gita Ayu, Indana, Zuria, Beby, Febi dan Uwik yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Dosen Pembimbing Lapangan KKN Desa Lancang Kuning 2017 Bapak Andres Putranta Sitepu, SE, M.Ak. Terimakasih atas bantuan dan

semangatnya ya pak, dan tak lupa untuk teman terbaik di KKN; Gita, Kadew, Eka, Idah, Epi, Bg Tama, Kameg, dan Kak Rina. Terimakasih sudah menghibur dan memberikan semangat yang luar biasa.

13. Serta teman-teman terbaik kelas sore 2 Akuntansi, Yuki's gengster, Pomcetar, dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih banyak sudah meluangkan waktu memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Tanjungpinang, 14 Agustus 2019
Penulis

YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
NIM: 14622317

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xx
<i>ABSTRACT</i>	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Ilmiah.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengendalian Internal	9
2.1.1. Pengertian Pengendalian Internal	9
2.1.2. Indikator Pengendalian Internal.....	11
2.1.3. Tujuan Pengendalian Internal	15
2.1.4. Pengendalian Internal yang Baik	16
2.1.5. Keterbatasan Pengendalian Internal.....	16
2.2. Informasi Akuntansi	17

2.3	Sistem Informasi Akuntansi.....	18
2.3.1	Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	19
2.3.2	Indikator Sistem Informasi Akuntansi.....	20
2.4	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	21
2.4.1	Tujuan dan Manfaat Aplikasi SIMDA.....	22
2.4.2	Klasifikasi SIMDA	23
2.4.3	Indikator SIMDA.....	24
2.4.4	Aplikasi SIMDA Keuangan.....	25
2.4.5	Perkembangan SIMDA Keuangan.....	25
2.4.6	<i>Output</i> yang dihasilkan	27
2.4.7	Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan	28
2.4.8	Keunggulan SIMDA Keuangan.....	28
2.4.9	Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan	30
2.5	Kualitas Laporan Keuangan.....	31
2.5.1	Indikator Laporan Keuangan	31
2.5.1	Komponen Laporan Keuangan	34
2.5.3	Tujuan Laporan Keuangan.....	35
2.6	Kerangka Pemikiran	36
2.7	Hipotesis	37
2.8	Penelitian Terdahulu	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian	45
3.2.	Jenis Data.....	45
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	46
3.4.	Populasi dan Sampel.....	47
3.4.1.	Populasi.....	47
3.4.2.	Sampel	48
3.5.	Definisi Operasional Variabel	49
3.6.	Teknik Pengolahan Data.....	50
3.7.	Teknik Analisis Data	50
3.7.1.	Uji Validitas.....	51

3.7.2.	Uji Reliabilitas	52
3.7.3.	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.7.3.1.	Uji Normalitas.....	53
3.7.3.2.	Uji Heteroskedastisitas	54
3.7.3.3.	Uji Multikolinearitas.....	55
3.7.3.4.	Uji Autokorelasi.....	55
3.7.4.	Uji Hipotesis	56
3.7.4.1.	Uji T (Uji Parsial)	56
3.7.4.2.	Uji F (Uji Simultan).....	56
3.7.5.	Uji Regresi Linier Berganda	57
3.7.6.	Uji Determinasi.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum.....	59
4.1.1.	Sejarah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	60
4.1.2.	Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau	61
4.1.3.	Susunan Organisasi Perangkat Daerah	63
4.2.	Deskripsi Responden	65
4.2.1.	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	65
4.2.2.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
4.2.3.	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	67
4.3.	Analisis Statistika	68
4.3.1.	Statistika Deskriptif	68
4.3.1.1.	Deskripsi Variabel Pengendalian Internal	68
4.3.1.2.	Deskripsi Variabel Informasi Akuntansi	72
4.3.1.3.	Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan	75
4.3.2.	Uji Kualitas Data	79
4.3.2.1.	Uji Validitas	79
4.3.2.2.	Uji Reliabilitas	82
4.3.3.	Uji Asumsi Klasik.....	83
4.3.3.1.	Uji Normalitas.....	83
4.3.3.2.	Uji Heteroskedastisitas	85

4.3.3.3. Uji Multikolinearitas.....	86
4.3.3.4. Uji Autokorelasi.....	87
4.3.4. Uji Hipotesis	87
4.3.4.1. Uji Parsial	87
4.3.4.2. Uji Simultan	89
4.3.5. Analisis Regresi Linear Berganda	90
4.3.6. Uji Determinasi.....	91
4.4. Pembahasan	92
4.4.1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuang-an.....	92
4.4.2. Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	92
4.4.3. Pengaruh Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	92

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1.	Jumlah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.....	47
Tabel 3.2.	Definisi Operasional Variabel.....	49
Tabel 3.3.	Interpretasi Nilai r Alpha Indeks Korelasi.....	53
Tabel 4.1.	Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....	63
Tabel 4.2.	Usia Responden.....	65
Tabel 4.3.	Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4.4.	Pendidikan Terakhir.....	67
Tabel 4.5.	Deskriptif Variabel Pengendalian Internal.....	68
Tabel 4.6.	Deskriptif Variabel Informasi Akuntansi.....	72
Tabel 4.7.	Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	75
Tabel 4.8.	Pengujian Validitas Variabel Pengendalian Internal.....	80
Tabel 4.9.	Pengujian Validitas Variabel Informasi Akuntansi.....	80
Tabel 4.10.	Pengujian Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	81
Tabel 4.11.	Pengujian Reliabilitas.....	82
Tabel 4.12.	Uji Kolmogrov-Smirnov.....	84
Tabel 4.13.	Uji Multikolinearitas.....	86
Tabel 4.14.	Uji Autokorelasi.....	87
Tabel 4.15.	Hasil Uji-T.....	88
Tabel 4.16.	Hasil Uji-F.....	89
Tabel 4.17.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	90
Tabel 4.18.	Uji Determinasi (R^2).....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1.	Bagan Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1.	Usia Responden.....	66
Gambar 4.2.	Jenis Kelamin.....	67
Gambar 4.3.	Pendidikan Terakhir.....	68
Gambar 4.4.	Hasil Uji Normalitas.....	83
Gambar 4.5.	Hasil Histogram.....	84
Gambar 4.6.	Uji Heteroskedastisitas.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
-----------------	-----------------------

Lampiran 1 :	Lembar Kuesioner
--------------	------------------

Lampiran 2 :	Tabulasi
--------------	----------

Lampiran 3 :	<i>Output</i> SPSS
--------------	--------------------

Lampiran 4 :	Surat Keterangan Penelitian dari Objek Penelitian
--------------	---

Lampiran 5 :	Hasil <i>Scan</i> Plagiat
--------------	---------------------------

Lampiran 6 :	<i>Curriculum Vitae</i>
--------------	-------------------------

ABSTRAK

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yosihara Halimah Thusa'diyah, 14622317. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.yosiharahalimah@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara parsial maupun secara simultan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar kuesioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 62 orang dan sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari populasi. Metode penarikan sampel yang digunakan yaitu Non Probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling, sehingga yang menjadi populasi dan sampel penelitian hanyalah pegawai bagian Keuangan dari setiap perangkat dinas Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil analisis regresi linear berganda didapati persamaan regresi yaitu $Y = 7,272 + 0,493X_1 + 0,617X_2 + e$, dengan tingkat error atau tingkat toleransi yaitu 5%. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa seluruh variabel bebas memiliki hubungan yang positif terhadap variabel bebas.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu variabel Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan nilai R Square adalah 0,719 atau 71,9% yang artinya, variabel Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh variabel Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi sebesar 71,9%. Sedangkan sisanya 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan.

Dosen Pembimbing : 1. Bambang Sambodo, S.E. M. Ak.
2. Hendy Satria, S.E. M. Ak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL AND ACCOUNTING INFORMATION ON QUALITY OF GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS RIAU ISLANDS PROVINCE

Yosihara Halimah Thussa'diyah, 14622317. *Accounting*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.yosiharahalimah@gmail.com

This study aims to determine the effect of Internal Control and Accounting Information on the Quality of Financial Statements of the Riau Islands Provincial Government partially or simultaneously.

The type of research used in this study is descriptive research with a quantitative approach. The type of data used in this study consists of primary data and secondary data. Data collection methods used in this study were using questionnaire sheets. The population in this study amounted to 62 people and the sample used was the entire population. The sampling method used is Non Probability Sampling with a Purposive Sampling technique, so that the only population and sample of the study is the Finance Department employee from each official service of the Riau Islands Province.

The results of multiple linear regression analysis found a regression equation that is $Y = 7.272 + 0.493X_1 + 0.617X_2 + e$, with an error rate or tolerance level of 5%. Based on the regression equation, it is known that all independent variables have a positive relationship to the independent variable.

The conclusion of this study is that the Internal Control and Accounting Information variables partially or simultaneously influence the Quality of Financial Statements. With the value of R Square is 0.719 or 71.9%, which means, the Financial Report Quality variable is influenced by the Internal Control and Accounting Information variables of 71.9%. While the remaining 28.1% is influenced by other variables outside of this study.

Keyword : *Internal Control, Accounting Information, Quality of Financial Statements.*

Supervisor : 1. Bambang Sambodo, S.E. M. Ak.
2. Hendy Satria, S.E. M. Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas dan diterima oleh seluruh rakyat. Pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good government* dapat tercermin dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan, serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan *good government* maka telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi; UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga paket Undang-undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dan kehendak untuk melaksanakan reformasi dibidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar dibidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang mendapatkan kewenangan luas dan nyata dari pemerintah pusat untuk bertanggungjawab dalam mengatur pemerintahannya secara mandiri. Kewenangan tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dimana kewenangan tersebut memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan suatu gambaran mengenai keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan posisi keuangan dalam suatu instansi pemerintah. Tidak terlepas dari peranannya laporan keuangan berguna dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu instansi pemerintah. Dalam mempublikasikan laporan keuangan sebagai informasi akuntansi yang dihasilkan instansi pemerintah, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggung jawaban.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi, juga pengendalian internal, serta data yang akurat. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) memberikan opini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai tanpa adanya pengendalian internal tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya perusahaan menggunakan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik.

Informasi akuntansi merupakan data yang diproses dan diolah dalam bentuk pencatatan yang runtun terkait dengan keuangan ataupun transaksi sehingga dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan seperti perusahaan, lembaga, pengusaha dan lain-lain. Adanya informasi akuntansi dibuat untuk mencapai beberapa tujuan diantaranya adalah menyediakan data terkait pengelolaan keuangan dan ketepatan penyajian.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil ringkasan laporan keuangan yang dapat memberikan sebuah informasi keuangan yang bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur serta dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pemakai. Serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat di bandingkan dengan periode sebelumnya.

Dalam laporan keuangan penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Di sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik/masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Pada pemerintah daerah pengendalian internal sangat dibutuhkan agar tujuan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Karena pengendalian internal terdapat indikator-indikator agar tujuan instansi pemerintah dapat tercapai. Pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pengendalian internal yang diterapkan sudah cukup baik tapi belum menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyelesaian tugas yang dibebankan.

Pengendalian internal juga mempengaruhi informasi akuntansi yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah sehingga untuk menunjang informasi akuntansi maka pemerintah diberi kemudahan dengan adanya SIMDA. SIMDA ini merupakan sistem yang dapat mempermudah pemerintah dalam membuat serta menyediakan laporan keuangan. Akan tetapi dalam pengaplikasian sistem tersebut masih terdapat kendala yaitu bendahara dan

operator SIMDA dikerjakan oleh satu orang sehingga terdapat kesalahan pada pengiputan data. Permasalahan juga terdapat pada laporan keuangan yang tidak tepat waktu serta masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dan beberapa kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fenomena yang terjadi dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat membuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah?
2. Apakah Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah?
3. Apakah Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengendalian internal dan informasi Akuntansi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan mengenai apa saja yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya untuk pengembangan konsep dan teori lebih lanjut tentang akuntansi sektor publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun beberapa sistematika penulisan yang penulis susun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis dalam Bab I menjelaskan tentang latar belakang ketertarikan penulis untuk mengangkat judul pengaruh pengendalian internal dan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga keakuratan penelitian lebih akurat dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang akan datang.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis dalam Bab III ini membahas metode penelitian tentang skala pengukuran data, tempat, waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, paradigma variabel penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisikan data-data yang dihasilkan dari lapangan di analisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan dilakukan pembahasan. Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai tanpa adanya pengendalian internal tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut.

Pengertian internal, sebagian ada yang menyebut pengendalian internal atau pengawasan internal adalah istilah yang diserap dari *internal controls*. Istilah tersebut merujuk pada proses di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan) dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya.

Pengertian pengendalian internal menurut beberapa ahli:

1. (Mulyadi, 2010) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
2. Sementara itu menurut (Hall, 2009) : Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan

memperbaiki efisiensi jalannya organisasi,serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Menurut (Chung, 2015) pada umumnya perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik.
4. (Tunggal, 2010) : Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Dan selanjutnya menurut (Krisimiaji, 2010) pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, menjelaskan tentang beberapa poin penting berkaitan dengan sistem pengendalian internal, antara lain:

- a. Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai/staf untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Adapun tujuan dibangunnya

sistem pengendalian internal adalah :

- 1) Untuk melindungi aset negara.
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.
- 4) Untuk menjamin laporan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 5) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.2 Indikator Pengendalian Internal

Unsur sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktekkan dilingkungan pemerintah diberbagai

negara yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas yang mencakup :

a. Nilai Integritas dan Etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan – tindakan yang benar. Menghilangkan godaan – godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dari fungsi pada masing – masing posisi dalam instansi pemerintah.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan resiko dalam mengambil keputusan.

d. Memiliki Struktur Organisasi

Kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan organisasi.

e. Pembagian Wewenang dan Pembebanan Tanggungjawab

Satuan usaha membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada.

f. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif.

g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Resiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penafsiran resiko mencakup :

a. Identifikasi Resiko

Mengidentifikasi secara efisien dan efektif , resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi

b. Analisis Resiko

Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi

3. Kegiatan Pengendalian

Merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisiensi dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup :

a. *Review* atas kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.

b. Pembinaan SDM

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d. Pengendalian fisik atas asset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

e. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukura kinerja

Ukuran dan indikator kinerja di tetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereview dan melakukan falidasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

f. Pemisahan fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.

4. Informasi dan Komunikasi

Adanya informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan yang harus dapat menilai kualitas kerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review dapat segera ditindak lanjuti.

Adanya Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal itu pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, dalam arti dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Menurut (Levany, 2011) alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian internal adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Sedangkan (Sunyoto, 2014) mengatakan sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Dan lain halnya menurut (Arens, 2009) tujuan dilakukannya pengendalian internal adalah:

1. Keandalan Pelaporan Keuangan, disini manajemen memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara jujur dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi, pengendalian dalam organisasi dimaksudkan mendorong efektivitas dan efisiensi dari pengguna sumber daya, termasuk tenaga kerja untuk memberikan keyakinan dan pencapaian tujuan organisasi.
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan, dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

Selain itu ada tujuan pengendalian internal lain yang tersirat, karena dianggap akan ikut tercapai jika tujuan utama pengendalian internal tercapai. Tujuan lain tersebut yaitu menjaga keamanan harta perusahaan. Dalam menjaga keamanan harta perusahaan, perlu ditetapkan kebijakan yang tepat, yang meliputi kebijakan dimana hanya orang-orang yang diberi wewenang saja yang dapat mengambil harta perusahaan. Selain itu diperlukan juga adanya keamanan fisik terhadap harta perusahaan.

2.1.4 Pengendalian Internal yang Baik

Menurut (Tunggal, 2010) terdapat 3 ciri-ciri pengendalian yang efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat Preventif

Pengendalian yang dapat menghentikan kesalahan pada saat akan terjadi.

2. Bersifat Detektif

Pengendalian yang segera dapat mengetahui suatu kesalahan yang telah terjadi secara tepat waktu.

3. Bersifat Korektif

Pengendalian yang dapat membantu untuk memecahkan kesalahan yang terjadi (berupa audit trail untuk melacak urutan transaksi dari awal hingga akhir suatu periode pemeriksaan).

2.1.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk

dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Menurut (Hery, 2012) sistem pengendalian internal perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aktiva perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Pada dasarnya, konsep jaminan yang memadai ini sangat terkait langsung dengan sebuah asumsi yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membentuk atau menerapkan prosedur pengendalian akan timbul atau dihasilkan dari pelaksanaan prosedur pengendalian tersebut.

Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, jenuh, ceroboh, tidak berkomunikasi dengan baik dan bersikap acuh tak acuh. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang begitu sempurna, termasuk sistem pengendalian internal yang dijalankan perusahaan.

2.2 Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi merupakan data yang diproses dan diolah dalam bentuk pencatatan yang runtun terkait dengan keuangan ataupun transaksi sehingga dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan seperti perusahaan, lembaga, pengusaha dan lain-lain. Adanya informasi akuntansi dibuat untuk mencapai beberapa tujuan diantaranya adalah menyediakan data terkait pengelolaan keuangan dan ketepatan penyajian.

Menurut (Supriyono, 2011) informasi akuntansi merupakan data yang

berfungsi menyajikan informasi kualitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari satuan usaha atau organisasi. Informasi tersebut akan dapat dipakai oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Teguh, 2009) informasi akuntansi adalah suatu sistem informasi berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk mengambil keputusan.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi dapat diselenggarakan sepenuhnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi terbaru, atau dapat berupa informasi keduanya. Menurut (Wing Wahyu, 2006) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi adalah sekumpulan seperangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal (manajemen perusahaan) dan pihak eksternal (pembeli, pemerintah, kreditur, dan sebagainya). (Krisimiaji, 2010) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang akan memproses suatu data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan menurut (Diana, 2011) definisi dari sistem informasi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Memproses transaksi yang dimaksud bisa berupa mencatat aktivitas pengeluaran kas ke dalam jurnal. Sistem Informasi Akuntansi juga didefinisikan oleh (Bodnar, 2010) ialah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi.

Lain halnya menurut (Azhar Susanto, 2009) Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data yang berkaitan masalah keuangan menjadi informasi keuangan yang berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem informasi akuntansi ini dikoordinasikan untuk menyediakan berbagai informasi tentang keuangan yang terjadi pada instansi, oleh karena itu peran informasi akuntansi ini sangat penting guna membantu instansi pemerintah/perusahaan melaporkan posisi keuangannya. Tanpa adanya informasi akuntansi ini sulit bagi instansi pemerintah/perusahaan menjalankan proses keuangannya.

2.3.1 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Diana, 2011) manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mengamankan harta kekayaan perusahaan. Ini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan.
2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan.
3. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.
4. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit. Karena data yang baik akan memudahkan proses audit.
5. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan.

6. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

2.3.2 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Informasi Akuntansi menurut (Robbins, 2009) dalam Diana Angelica kemampuan pemakai sistem informasi dapat dilihat dari:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan sebagai pemakai sistem informasi dapat dilihat melalui:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi.
- b. Memahami pengetahuan tugas dari pekerjaannya sebagai pemakai sistem informasi.

2. Kemampuan (*abilities*)

Kemampuan sebagai pemakai sistem informasi dapat dilihat dari:

- a. Kemampuan menjalankan sistem informasi yang ada.
- b. Kemampuan untuk mengekspresikan kebutuhan informasi.
- c. Kemampuan untuk mengekspresikan bagaimana sistem seharusnya.
- d. Kemampuan mengerjakan tugas dari pekerjaan.

3. Keahlian (*skills*)

Keahlian sebagai pemakai sistem informasi dapat dilihat dari:

- a. Keahlian dalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawab.
- b. Keahlian dalam mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya dalam pekerjaan.

2.4 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Hasil pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah Program Aplikasi SIMDA Keuangan, Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), Program Aplikasi SIMDA Gaji, dan Program Aplikasi SIMDA Pendapatan.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Menurut (Sukirman, 2009) Aplikasi SIMDA merupakan

aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga *outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.4.1 Tujuan dan Manfaat Aplikasi SIMDA

Tujuan pengembangan aplikasi SIMDA adalah:

1. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatatur daerah maupun

pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA adalah sebagai berikut: BPKP (2008)

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
- b. Data yang sama akan tercek dan pengulangan cek akan dilakukan otomatis
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 - 1) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

2.4.2 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP : 2008) yaitu:

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/lembaga/badan

sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah.

3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

2.4.3 Indikator SIMDA

Menurut Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Indikator SIMDA terdiri dari empat lapis struktur yaitu sebagai berikut :

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik. Kemudahan akses oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik, ada batasan untuk masyarakat yang akan mengakses situs pelayanan publik. Sering terjadinya gangguan pada jaringan internet sebaiknya jaringan telekomunikasi dengan computer harus didukung dengan jaringan internet yang baik.
2. Portal, pelayanan publik, situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. Pelayanan publik terhubung dengan akses media komunikasi terhadap pemakai informasi. Pemakai informasi menggunakan situs web sebagai pengelolaan informasi dokumen.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung (*back office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Organisasi sebagai alat penyedia transaksi informasi dan dokumen elektronik lainnya.

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Informasi manajemen harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perawatan secara berkala untuk *software* sistem informasi tersebut. Aplikasi harus terdapat keterkaitan antara *back office* dan portal pelayanan publik atau sebaliknya. Sistem informasi manajemen daerah harus didukung oleh jaringan yang baik, handal, aman, dan terpercaya agar memiliki kualitas informasi yang baik.

2.4.4 Aplikasi SIMDA Keuangan

Program Aplikasi SIMDA Keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara integrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.4.5 Perkembangan SIMDA Keuangan

1. SIMDA Versi 1.0

Aplikasi SIMDA versi 1.0 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja daerah, tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draf sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai tahun 2004.

2. SIMDA Versi 2.0

Aplikasi SIMDA versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat dari adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 tahun 2005 mengenai SAP, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai aplikasikan sejak tahun 2004 sampai tahun 2006.

3. SIMDA Versi 2.1

SIMDA Versi 2.1 merupakan sistem informasi versi terbaru yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri No. 3 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2.4.6 *Output yang dihasilkan*

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (BPKP,2008) adalah:

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d. Surat Tanda Setoran (STS)
 - e. Register
 - f. Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
 - d. Laporan Realisasi Anggaran
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Neraca

Dan juga terdapat:

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan

- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan.

2.4.7 Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan (BPKP, 2008)

adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) audit.

2.4.8 Keunggulan SIMDA Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan menurut (BPKP: 2008) adalah:

1. Output atau laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Berbasis windows
3. Validasi imputan data lebih terjamin
4. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan

pencatatan akuntansi, dan

5. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

Selain manfaat dibidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Kesiambungan

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

3. *Transfer of knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya”.

4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah

mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

2.4.9 Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasinya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasangkan program tersebut. Hal ini yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah biaya dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Itu berarti bahwa setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, uang dan modal yang terjadi dalam instansi pemerintah atau suatu perusahaan serta laba dan ruginya.

Menurut (Obaidat & Hapsari, 2009) agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sementara (Saidin, 2009) menyebutkan kriteria yang harus oleh pelaporan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, dirinya adalah relevan, andal dapat dibandingkan, dapat dimengerti tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dimengerti dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat makan akan mengurangi manfaatnya.

2.5.1 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Unsur Informasi yang relevan sebagai berikut:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5.1 Komponen Laporan Keuangan

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah menurut (ETAP : 2009) meliputi:

1. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut; kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau

laba per saham.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk satu periode, termasuk didalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan Laporan Keuangan

Yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasannya lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.5.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 2010) SAP

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut: pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

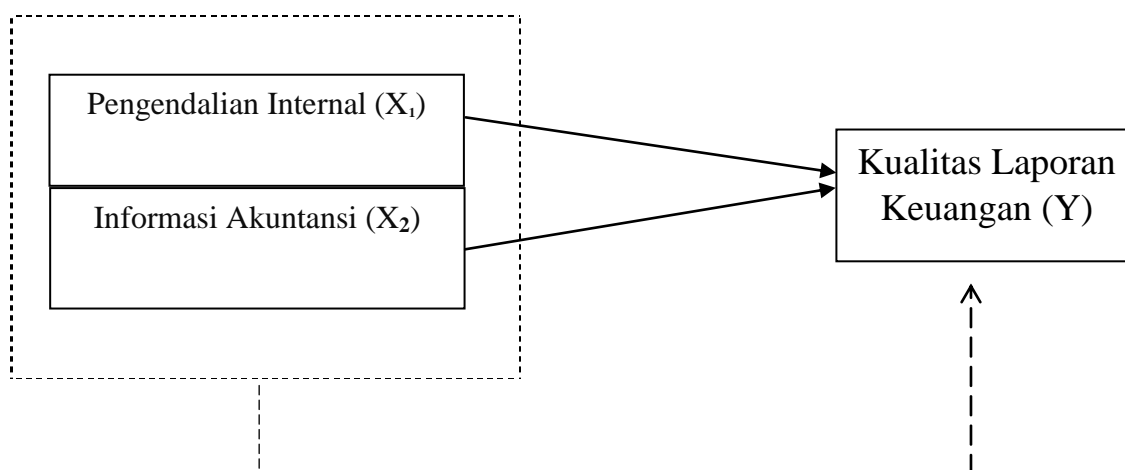
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari peneliti yang dikumpulkan dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan dan landasan teori. Kerangka pemikiran yang baik apabila dapat mengidentifikasi variabel-

variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara logis mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

Gambar 2. 1
Bagian Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- > : Parsial adalah pengaruh masing-masing variabel bebas dan variabel terikat
- > : Simultan adalah pengaruh secara bersama atau keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat.

2.7 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sementara sebagai berikut :

- H1 : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- H2 : Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- H3 : Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi signifikan secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Cipmawati Mohune dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo). Populasi penelitian adalah 25 orang yang merupakan karyawan di Pemerintah tersebut. Data penelitian adalah kuesioner sebagai data primer. Berdasarkan hasil analisis regresi untuk variabel X (penerapan sistem informasi manajemen daerah) bernilai positif sebesar 0,665. Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa SIMDA

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,753. Nilai ini berarti bahwa sebesar 75,3% kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah, sedangkan sisanya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, variabel lain tersebut antara lain sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia. Maka dapat dikatakan bahwa semakin baik Sistem Informasi Manajemen Daerah maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

2. Tuti Herawati dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah PEMDA Cianjur)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah PEMDA Cianjur). Populasi dalam penelitian ini adalah OPD yang ada di Kabupaten Cianjur, dengan sampel yang berjumlah 31 OPD. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Inspektorat Daerah yang membina dan mengawasi OPD di Kabupaten Cianjur. Data penelitian adalah data primer dengan memberikan kuesioner secara langsung oleh peneliti. Hasil dari pengujian hipotesis yang diajukan yakni terdapat pengaruh sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berdasarkan nilai F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dimana diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 24.41 dan nilai F_{tabel} 2.52

ternyata lebih besar dari nilai F di tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Atau dengan kata lain sistem pengendalian intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Mohammad Alfian dengan judul penelitian “Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Kulon Progo” Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung penerapan SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan pemerintah daerah) pada SKPD (lembaga pemerintah daerah) dan pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini didasarkan pada implementasi SIMDA yang kurang, seperti yang ditunjukkan oleh kualitas informasi akuntansi yang tidak memadai. Kurang memadainya kualitas informasi akuntansi diindikasikan oleh semakin sedikitnya jumlah SKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan auditnya. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kulon Progo, Yogyakarta. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. Dapat dilihat juga bahwa nilai R^2 untuk variabel SIMDA menunjukkan hasil 0,696276, yang berarti bahwa dukungan manajemen puncak, kualitas data *input* dan tingkat pengetahuan pengguna mengenai SIMDA memengaruhi implementasi SIMDA sebesar 69,6 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 30,4 persen faktor atau variabel lain yang mendukung implementasi

SIMDA pada SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan nilai R^2 untuk variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,521133, yang menunjukkan bahwa SIMDA memengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 52,1 persen, sehingga masih ada 47,9 persen variabel atau faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hipotesis dianalisis menggunakan model persamaan struktural melalui *Smart PLS*. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas input data dan tingkat pengetahuan pengguna tentang SIMDA berdampak positif terhadap implementasi SIMDA. Selain itu, dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA. Selanjutnya, penelitian juga menemukan bahwa implementasi SIMDA memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.

4. Stergios Tasio dengan judul "*Auditor's perceptions of financial reporting quality: The case of Greece*" Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi persepsi auditor terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan pada karakteristik kualitatif dari informasi pelaporan keuangan yang didefinisikan oleh IASB dalam kerangka konseptualnya. Menurut IASB prasyarat kunci untuk kualitas dalam pelaporan keuangan adalah kepatuhan terhadap obyektif dan karakteristik kualitatif informasi pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif adalah atribut yang membuat informasi keuangan berguna dan terdiri dari relevansi, representasi yang setia, komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu, dan mudah dimengerti. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta

faktor-faktor yang mengarah pada kualitas yang buruk. Akhirnya, upaya dilakukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan perusahaan Yunani sesuai dengan masing-masing karakteristik kualitatif informasi pelaporan keuangan. Hasil menunjukkan bahwa auditor merasakan karakteristik kualitatif informasi pelaporan keuangan sebagai elemen kualitas yang penting dari laporan keuangan. Sejauh kualitas laporan keuangan perusahaan Yunani yang bersangkutan auditor merasa itu menjadi kualitas moderat dikaitkan terutama untuk manajemen laba, tata kelola perusahaan yang buruk, kepemilikan keluarga dan penyimpangan dari prinsip akuntansi. Auditor merasakan kualitas pelaporan keuangan perusahaan Yunani yang disediakan melalui internet (yaitu situs perusahaan) menjadi moderat baik secara individual untuk setiap karakteristik kualitatif dan dalam penilaian keseluruhan juga. Hasil dari pertanyaan ini konsisten dengan hasil dari pertanyaan sebelumnya yang memeriksa keseluruhan kualitas pelaporan keuangan perusahaan Yunani. Dua pertanyaan berikutnya menyelidiki pandangan auditor terhadap faktor-faktor yang mengarah pada kualitas pelaporan keuangan yang buruk dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas. Faktor-faktor utama yang diyakini oleh auditor menyebabkan kualitas yang buruk dalam pelaporan keuangan adalah manajemen laba (23,52% dari respons), tata kelola perusahaan yang buruk (14,7%), penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi (11,76%), tidak cukup pengawasan / audit dari otoritas publik, dan kepemilikan keluarga (11,76%). Di sisi lain faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan adalah kerangka pengawasan ketat (18,72%),

audit kualitas audit yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi (17,73%) dan pelatihan personil perusahaan (17, 73%) yang menurut banyak responden dalam komentar mereka dianggap tidak mencukupi. Temuan bahwa faktor utama yang menyebabkan kualitas buruk dalam pelaporan keuangan perusahaan Yunani adalah manajemen laba memverifikasi hasil survei lain yang dilakukan di Yunani yang menemukan indikasi bahwa perusahaan Yunani mengelola pendapatan mereka.

5. Dewi Indriasih dengan judul *“The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On The Performance Accountability In Local Government (Survey Of All Units Local Government In Tegal City – Central Java Province- Indonesian)”*
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah dan efektivitas pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Kinerja di pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh unit pemerintah daerah di Kota Tegal - Provinsi Jawa Tengah. Sampelnya terdiri dari personel yang terlibat dalam pelaksanaan akuntansi, yaitu staf akuntansi dan manajer akuntansi. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap responden di semua unit pemerintah daerah di Kota Tegal - Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh kemudian diuji validitasnya dan reliabel, sehingga data tersebut valid untuk diproses. Data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk

menggambarkan karakteristik masing-masing variabel. Data akan dianalisis menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Statistik T digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian, maka kita bandingkan t-nilai dengan nilai tabel t-pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria keputusan: Jika $t \leq t$ tabel: H_0 diterima dan H_a os menolak, dan jika t -hitung $>$ t -tabel: H_0 ditolak dan H_a diterima. Setiap hipotesis akan diuji melalui uji t statistik: H_0 ditolak jika $t >$ t -kritis, $\alpha = 0,05$.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengertian penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2011) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang data-datanya berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif ke dalam data kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengendalian Internal (X1), Informasi Akuntansi (X2), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut (Martono, 2014) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian angket (Kuesioner).

Data primer dalam penelitian ini berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Yang kedua yaitu data sekunder merupakan data yang ber-

sumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data atau informasi dari objek yang akan diteliti. Ada berbagai teknik pengumpulan data yang bisa kita gunakan diantaranya adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis untuk mendapatkan data yang valid dari responden sehingga data dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut cukup rinci dan lengkap. Kuesioner dapat diberikan langsung secara tatap muka antara pengumpul data dan responden, dan dapat juga dikirimkan kepada respondennya yang jauh.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 62 orang yang diambil dari 2 orang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah OPD di Provinsi ini terdiri dari:

Tabel 3.1
Jumlah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	2 Orang
2	Sekretariat DPRD	2 Orang
3	Inspektorat Daerah	2 Orang
4	Dinas Pendidikan	2 Orang
5	Dinas Kesehatan	2 Orang
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2 Orang
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2 Orang
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2 Orang
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	2 Orang
10	Dinas Perindustrian Perdagangan	2 Orang
11	Dinas Koperasi & Ukm	2 Orang
12	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	2 Orang
13	Dinas Pariwisata	2 Orang
14	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	2 Orang
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Orang
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	2 Orang
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2 Orang
18	Dinas Kebudayaan	2 Orang

19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 Orang
20	Dinas Sosial	2 Orang
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2 Orang
22	Dinas Perhubungan	2 Orang
23	Dinas Kelautan & Perikanan	2 Orang
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2 Orang
25	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	2 Orang
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	2 Orang
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Orang
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2 Orang
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	2 Orang
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2 Orang
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Orang
Total		62 Orang

Sumber : *Data Sekunder Penelitian (2019)*.

3.4.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dikarenakan populasi berjumlah dibawah 100 sehingga diambil semua untuk menjadi sampel yang akan diteliti. Menurut (Arikunto, 2010) untuk menentukan besarnya sampel, dilakukan jika populasi dibawah 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya disebut populasi penelitian. Untuk itu sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendaharapada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Riau. Penentuan kriteria sampel didasarkan

pada alasan bahwa bagian keuangan dan bagian penatausahaan keuangan merupakan pihak-pihak yang sering berkaitan dengan keuangan.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. (Lilik Suprapti, 2010) menyatakan bahwa definisi operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi dari suatu faktor berkaitan dengan variasi dari faktor lainnya.

Table 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengendalian Internal (X1)	Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.	-Lingkungan Pengendalian -Penilaian Resiko -Kegiatan Pengendalian -Informasi dan Komunikasi -Pemantauan	Likert
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis	-Pengetahuan -Kemampuan -Keahlian	Likert
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan.	-Relevan - Andal -Dapat Dibandingkan -Dapat Dipahami	Likert

Sumber : *Data sekunder yang diolah (2019).*

3.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian ini, karena dalam pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil teknik pengolahan data untuk penelitian dengan pendekatan Kuantitatif.

Adapun langkah-langkah pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

b. *Coding*

Coding adalah kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penganalisisan dan penafsiran data.

c. *Tabulating*

Tabulating adalah kegiatan memasukan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel agar mudah dipahami.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiyono, 2015) adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul untuk menjawab rumusan masalah dan untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan program *SPSS* versi 23

untuk pengolahan data dengan pengujiannya menggunakan metode-metode pengujian sebagai berikut:

3.7.1. Uji Validitas

Menurut (Priyatno, 2011) Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu *item* dalam kuesioner atau skala, apakah *item-item* pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Menurut (Sugiyono, 2013) valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala. Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini digunakan rumus korelasip*product moment*, diolah menggunakan Program *SPSS 23* dengan kriteria sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{[(n \sum X^2) - (\sum X)^2] \cdot [(n \sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

r = Korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah responden

X = Jumlah skor item

Y = Jumlah skor total seluruh item

Prosedur pengujian :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen valid

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen tidak valid

2. Jika probabilitas (sig) $< \alpha$ maka instrumen valid

Jika probabilitas (sig) $> \alpha$ maka instrumen tidak valid

3. Penjelasan dan kesimpulan dari butir 1 dan 2 dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} dan probabilitas (sig) dengan r_{tabel} maka akan disimpulkan instrumen tersebut dinyatakan valid atau sebaliknya.
4. Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui program SPSS (*Statistical Program and Service Solution seri 23*).

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas pada penelitian ini, menggunakan pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan program *SPSS (Statistical Program and Service Solution)* 23. Uji Reliabilitas menunjukkan kepada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabel artinya dapat dipercaya, untuk mengetahui tingkat reliabel kuisisioner maka digunakan rumus *Alpha Cronbach* berikut ini:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right]$$

Dimana :

r_{11} = Realibilitas instrumen

k = Banyaknya soal

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah skor varians item

σ_i^2 = Varians tota

Prosedur pengujian :

2.8.1 Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen reliabel

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen tidak reliabel

2.8.2 Jika probabilitas (sig) < korelasi maka instrumen reliabel

Jika probabilitas (sig) > korelasi maka instrumen tidak reliabel

2.8.3 Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan melalui program SPSS

(*Statistical Program and Service Solution seri 23*)

Tabel 3.3
Interprestasi Nilai r Alpha Indeks Korelasi

Koefisien r	Reliabilitas
0,8000 – 1,0000	Sangat Tinggi
0,6000 – 0,7999	Tinggi
0,4000 – 0,5999	Sedang
0,2000 – 0,3999	Rendah
0,0000 – 0,1999	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2009)

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik biasanya dilakukan dengan penelitian untuk menguji kelayakan atas model regresi yang dilakukan. Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

3.7.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah dalam

model regresi pada variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal atau yang memiliki distribusi data normal atau yang mendekati normal.

Menurut (Priyatno, 2012) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode uji normalitas yang digunakan yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual*.

Menurut (Priyatno, 2012) dasar pengambilan keputusan adalah apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas-normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Priyanto, 2012) heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai macam uji heteroskedastisitas yaitu dengan uji *Glejser*, melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi, atau uji Koefisien Korelasi *Spearman's Rho*.

Model ini dilakukan dengan cara melibatkan grafik *scatterplots* antara *standardized predicted value (ZPRED)* dengan *studentized residual (SRESID)*, ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplots* antara *SRESID* dan *ZPRED*

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$).

3.7.3.3. Uji Multikolinearitas

Menurut (Priyanto, 2012) Multikolinearitas adalah keadaan pada dimana model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini *total ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel bebas yang nilai korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol.

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor (VIF)*. Nilai *tolerance* yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada Multikolinearitas diantara variabel bebas.

3.7.3.4. Uji Autokorelasi

Menurut (Priyanto, 2012) autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode 1 dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin Watson* (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $d < DL$ atau $DW > (4-DL)$, maka H_0 ditolak, artinya terjadi korelasi
- Jika d terletak antara DU dan $(4-DU)$, H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- Jika d terletak antara DL dan DU atau antara $(4-DU)$ dan $(4-DL)$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

3.7.4. Uji Hipotesis

3.7.4.1. Uji T (Uji Parsial)

Menurut (Priyanto, 2012) Uji T atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian dilakukan dengan :

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- c. Jika nilai $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak
- d. Jika nilai $sig > 0,05$ maka H_0 diterima

3.7.4.2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F: Pengaruh Pengendalian Internal (X_1), dan Informasi Akuntansi (X_2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kriteria pengujian dilakukan dengan :

1. Membandingkan hasil perhitungan F dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
 - b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterimadan H_0 ditola
2. Menentukan nilai titik kritis untuk F Tabel pada $db_1=k$ dan $db_2 =n-k-1$
 3. Menentukan dan membandingkan nilai probabilitas (*sig*) dengan nilai α (0,05) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jika nilai $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak
 - b. Jika nilai $sig > 0,05$ maka H_0 diterima
 4. Menentukan kesimpulan dari hasil uji hipotesis

3.7.5. Uji Regresi Linier Berganda

Didalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel sebagai indikatornya yaitu Pengendalian Internal(X_1), dan Informasi Akuntansi (X_3) Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang mempengaruhi variabel lainnya maka dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS

23. Persamaan umum regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + et$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = Pengendalian Internal

X2 = Informasi Akuntansi

a = konstanta

et = error term

b_1, b_2 = Koefisien regresi

3.7.6. Uji Determinasi

R square (R^2) atau kuadrat dari R , yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah kedalam bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. *R square* biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh regresi menggunakan satu atau dua variabel independen (Priyanto, 2012). Karena dalam penelitian terdapat dua buah variabel independen (Pengendalian Internal dan Informasi Akuntansi) maka uji koefisien determinasi akan dilihat nilai *R square*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hall, J. A. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi buku 1 edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. (2012). *Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi edisi ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Levany. (2011). *Sistem pengendalian Internal*.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Obaidat, & Hapsari. (2009). *Accounting Information Qualitative Characteristic*.
Surabaya.
- Priyanto, D. (2012). *Belajar Cepat Analisis Data dengan SPSS*. Jakarta: ANDI.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media.

- Rianse, U., & Abdi. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Rochaety, E. (2008). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saidin. (2009). *Audit Committe Characteristic* Bandung
- Siswanto, H. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 2009. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirman, D. (2009). *Pemahaman Laporan Keuangan dengan SIMDA Keuangzn*. Jakarta.
- Sunyoto, D. (2014). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Yogyakarta: CAPS.
- Sunyoto, D. (2011). *Praktik SPSS untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Tunggal, A. W. (2010). *Teori dan Praktek Auditing*. Jakarta: Harvarindo..
- Zakiyudin, A. (2011). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan

CURICULUM VITAE



Nama : YOSIHARA HALIMAH THUSSA'DIYAH
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 28Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor HP : 0819 9155 7641
Email : yosiharahalimah@gmail.com
Alamat : Jalan Sumatera No: 162 A

Nama Orang Tua

a. Ayah : Soemardi Soedarso (Alm)
b. Ibu : Chalidi Al Elisa

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 014 BINAAN BUKIT BESTARI
b. SMP : SMPN 5 TANJUNGPINANG
c. SMA : SMAN 1 TANJUNGPINANG
d. S1 : STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG